

**JUMLAH PENDUDUK SEBAGAI PEMODERASI PENGARUH
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAN *LEVEL OF CAPITAL OUTLAY*
TERHADAP *FINANCIAL DISTRESS***

**Ni Luh Made Dwi Indri Mutia Mahayani¹
Gayatri²**

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: dwiindrimutiamahayani@rocketmail.com telp: +62 85333 943 080

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Financial distress pada sektor publik dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yang tercermin pada ketidakmampuan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik sesuai dengan standar. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh kemandirian keuangan dan *level of capital outlay* (LCO) terhadap *financial distress* dengan jumlah penduduk sebagai pemoderasi. Penelitian ini mencakup 9 kabupaten/kota Provinsi Bali dengan menggunakan data laporan realisasi APBD dari Biro Keuangan Provinsi Bali dan data jumlah penduduk dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali periode 2010-2015 sehingga didapatkan sampel jenuh sebanyak 54 data amatan. Teknik analisis yang digunakan adalah uji regresi linier berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil pengujian hipotesis menunjukkan kemandirian keuangan dan LCO berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*. Hasil uji moderasi menunjukkan bahwa jumlah penduduk memperkuat pengaruh kemandirian keuangan terhadap *financial distress* sedangkan jumlah penduduk memperlemah pengaruh LCO terhadap *financial distress*

Kata Kunci: kemandirian, LCO, *financial distress*, penduduk

ABSTRACT

Financial distress in public sector caused by internal or external factor and described by the government's incapable in giving the standard public service. The purpose of this study is to determine the effect of fiscal autonomy and level of capital outlay (LCO) on financial distress using citizen population as moderating variabel This study covers 9 districts/cities in Bali Province and using data from budget realization report obtained at the Bali Provincial Finance Bureau and amount of citizen population obtained at the Central Bureau of Statistics of Bali in 2010-2015, so the sample is consist of 54 data. This research using linier regression analysis and moderated regression analysis (MRA).The test results showed fiscal autonomy and LCO have positive and significant impact on financial distress. The moderation's results showed citizen population strengthen the effect of fiscal autonomy on financial distress and citizen population weaken the effect of fiscal autonomy on financial distress.

Keywords : *autonomy, LCO, financial distress, citizen*

PENDAHULUAN

Forum Indonesia untuk Transparan (FITRA) menyatakan bahwa terdapat 291 pemerintah daerah yang memproyeksi 50 persen lebih anggaran untuk belanja pegawai pada tahun 2012 yang dimana anggaran yang tersisa dan tersedia untuk belanja program pemenuhan layanan publik hanya sekitar 9 persen hingga 14 persen (Prayitno, 2012). Laporan evaluasi belanja modal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada tahun 2013, menyatakan bahwa pemerintah daerah masih mengalami penyerapan belanja modal yang rendah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Realisasi Belanja Modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diakhir tahun yang lebih rendah dari pada anggarannya yaitu hanya 95 persen. Namun disisi lain, belanja pegawai tidak langsung memiliki tingkat penyerapan pada realisasi APBD tahun 2011 mencapai 110,60 persen (realisasi Rp 224,95 triliun sedangkan pagu anggaran sebesar Rp 203,39 triliun). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah masih belum efektif dan efisien dalam mengoptimalkan belanja daerah khususnya belanja modal yang memiliki peranan penting dalam pelayanan publik (Kementerian Keuangan, 2013).

Belanja modal menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 adalah belanja langsung pemerintah yang digunakan dalam pengadaan pembangunan aset tetap berwujud dengan nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk menunjang kegiatan atau program kerja pemerintah, seperti: tanah, gedung dan bangunan, irigasi dan jaringan, peralatan dan mesin, serta aset tetap lainnya. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan kualitas

dan pelayanan publik dan masyarakat dapat merasakan sendiri hasil dari pelayanan pemerintah tersebut, seperti: belanja modal jalan dan jembatan, belanja modal alat-alat kedokteran, belanja modal bangunan dan gedung untuk kegiatan kemasyarakatan, alat angkutan, belanja modal alat keamanan, belanja modal hewan ternak (Ardhini, 2011).

Pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah menentukan besarnya target belanja modal pemerintah daerah. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Besarnya target belanja modal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah adalah sebesar 26 persen untuk tahun 2010, 27 persen untuk tahun 2011, 28 persen untuk tahun 2012, 29 persen untuk tahun 2013 dan 30 persen untuk 2014. Namun, berdasarkan hasil evaluasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada tahun 2013 dan hasil diskusi dari Forum Indonesia untuk Transparan (FITRA) masih banyak pemerintah daerah yang memproyeksikan belanja untuk pemenuhan pelayanan publik hanya sekitar 9 persen hingga 14 persen dan hasil realisasi belanja modal belum maksimal.

Apabila fenomena-fenomena diatas terus berlanjut, maka tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah akan mengalami *financial distress*. *Financial distress* dapat terjadi pada berbagai jenis sektor usaha baik itu yang dimiliki swasta atau pemerintahan. Menurut Kleine *et al* (2005), *financial distress* pada pemerintahan diartikan sebagai kegagalan pemerintah untuk mencapai standar pada kegiatan operasi, utang, kebutuhan masyarakat dalam beberapa tahun

berurut-turut. Jones dan Walker (2007) menjelaskan *financial distress* dalam konteks sektor publik adalah suatu kegagalan dari pemerintah dalam penyediaan layanan ataupun fasilitas publik yang sesuai standar, dimana hal ini diakibatkan oleh ketidakcukupan dana yang dimiliki pemerintah dalam pembiayaan untuk infrastruktur publik seperti saluran irigasi, jembatan, serta fasilitas lainnya. *Financial distress* juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang signifikan mengenai ketidakseimbangan antara beban dan pendapatan secara berkelanjutan (Trussel dan Patrick, 2009). Jadi dapat disimpulkan bahwa *financial distress* pada pemerintah daerah merupakan kegagalan atau ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Penyebab kegagalan pemerintah dalam mencapai standar pemenuhan kebutuhan masyarakat disebabkan oleh banyak faktor baik itu faktor politik, sosial, ataupun ekonomi. Clark (1977) menyatakan kesulitan keuangan pada pemerintah sebagian besar disebabkan oleh kurangnya kesesuaian antara sumber daya yang dimiliki terhadap masalah social dan ekonomi, pengeluaran atau tingkat utang pemerintah daerah. Clark menggunakan empat indikator untuk memprediksi *financial distress* yaitu: beban keuangan pemerintah yang terdiri dari: kesulitan dalam pembayaran utang, indikator rasio (seperti: jumlah utang terhadap dengan pajak, utang jangka panjang terhadap utang jangka pendek), karakteristik sosial-ekonomi (seperti: jumlah penduduk, pendapatan per kapita), dan pengukuran arus pendanaan.

Kleine *et al.* (2005) meneliti faktor yang mempengaruhi terjadinya *financial distress* menggunakan sembilan indikator yang terdiri dari: *population growth*,

size of general fund balance, real taxable value growth, large real taxable value decreased, general fund expenditure as percentage of taxable value, general fund operating deficit, fund deficit in current or previous year, general long term debt as a percentage of taxable value, dan prior general fund operating defici. Jones dan Walker (2007) menyatakan bahwa terjadinya *financial distress* pada pemerintah daerah dapat dilihat dari keadaan keuangan pemerintah daerah, karakteristik dewan, dan kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah.

Financial distress pada pemerintah daerah dipengaruhi oleh tingkat kemandirian daerah, letak geografis, opini audit, jumlah penduduk, luas wilayah, serta total aset (Wicaksono, 2015). Kemandirian keuangan mempengaruhi *financial distress* karena kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu kekuatan pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program kerjanya yang berasal dari daerah itu sendiri. Penduduk menggambarkan kompleksitas dalam suatu daerah dan juga menggambarkan tingkat pembayaran transfer pemerintah yang berkaitan dengan jumlah sumber daya mungkin dapat disalahgunakan oleh pejabat pemerintah (Syurmita 2014; Sartika 2016).

Penelitian ini menggunakan variabel keuangan yang berupa kemandirian keuangan dan *level of capital outlay* (LCO) dan variabel nonkeuangan yaitu jumlah penduduk dalam menganalisis *financial distress* di Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Bali. Penelitian ini tidak sama dengan penelitian terdahulu, letak perbedaannya adalah penggunaan jumlah penduduk sebagai pemoderasi

pengaruh hubungan kemandirian keuangan dan *level of capital outlay* terhadap *financial distress*.

Penduduk dalam kegiatan pemerintahan memiliki peranan penting sebagai kontributor keuangan dan juga sebagai pengawas kinerja pemerintah. Tingkat kemandirian daerah tergantung pada potensi daerah serta sumber daya yang dimiliki daerah tersebut salah satunya adalah penduduknya. Penduduk memiliki peranan penting dalam peningkatan kemampuan daerah dalam membiayai segala kegiatan pemerintahan melalui kontribusi masyarakat berupa pajak dan retribusinya, sehingga dengan tingginya tingkat jumlah penduduk maka kemandirian keuangan daerah pun semakin meningkat.

Kemandirian keuangan menggambarkan seberapa besar kemampuan suatu daerah yang menggunakan sumber keuangannya sendiri untuk membiayai program kerja yang telah dibuat terlepas dari bantuan pemerintah pusat atau provinsi. Tingginya jumlah penduduk mengindikasikan tingkat kemandirian keuangan yang tinggi sehingga dana yang tersedia untuk belanja modal dan pemerintah pun akan mengalokasikan belanja modal sesuai dengan kebutuhan jumlah penduduk tersebut (Syurmita, 2014; Wicaksono 2015; Tubels, 2015; Ardhini, 2011).

Peningkatan jumlah penduduk juga akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan. Efisiensi pada kegiatan pemerintahan dapat dilihat dari perbandingan output dan input dari realisasi penerimaan daerah. Pada penelitian ini rasio efisiensi dilihat melalui besarnya tingkat belanja modal terhadap tingkat realisasi PAD. Pihak-pihak berwenang dalam pemerintahan merupakan

wakil-wakil rakyat yang harus melaksanakan kegiatan atau program untuk kepentingan masyarakat luas dengan menggunakan prinsip dari, oleh dan untuk rakyat. Maka dari itu, penduduk sebagai pengawas kinerja pemerintah akan secara tidak langsung akan membuat kinerja pemerintah menjadi semakin efektif dan efisien (Wolff, 2004; Kleine *et al.* 2005; Syurmita, 2014; Wicaksono, 2015).

Penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *financial distress* pada pemerintah daerah dapat dijelaskan dengan teori agensi dan teori ketergantungan sumber daya. Jensen dan Meckling (1967) menjelaskan masalah keagenan yang disebabkan oleh pertentangan kepentingan antara agen selaku manajemen dan prinsipal selaku pemilik, baik itu permasalahan yang berupa *asymmetric information*, *adverse selection*, ataupun *moral hazard*. Moe (1984) menyatakan keterikatan prinsipal-agen dalam pemerintahan dapat ditelusuri dalam *budgeting process* yaitu antara: publik–pihak legislatif, pihak legislatif-pemerintah, menteri keuangan–pengguna anggaran, perdana menteri-birokrat, serta pejabat-pemberi pelayanan.

Hubungan keagenan dalam sektor publik terjadi antara pemerintah dengan publik, dimana publik memiliki posisi sebagai prinsipal yang memberikan mandatnya kepada pemerintah yang memiliki posisi agen dalam menyuarakan opininya. Menurut Hagen (2003) pendelegasian opini publik kepada legislatif dapat diilustrasikan dengan publik memberikan dana berupa pajak kepada pemerintah untuk membiayai segala kebutuhan publik, dimana dalam pengelolaan dana tersebut publik mempercayakan kepada lembaga legislatif dengan harapan bahwa dana yang mereka sudah berikan tersebut dipergunakan dengan baik dan

sesuai dengan kebutuhan publik. Pada kenyataan di Indonesia masih banyak terdapat penyalahgunaan dana publik untuk kepentingan para pejabat tinggi tertentu yang tidak mengindahkan kepentingan publik.

Keberlangsungan kegiatan pemerintahan tidak hanya tergantung pada pihak internal dalam pemerintahan tetapi juga penduduk selaku penyokong kegiatan pemerintahan. Teori ketegantungan sumberdaya yang dikemukakan oleh Emerson (1961) menjelaskan bahwa hubungan antara konsep kekuasaan dengan konsep ketergantungan dalam suatu organisasi. Ketergantungan merupakan bagian utama dari kekuasaan, dimana organisasi yang memiliki kekuasaan, yang berkaitan dengan lingkungan sekitar terkait dengan tugas dan wewenang organisasi tersebut. Kekuatan pemerintah daerah selaku organisasi dapat dilihat dari sisi keuangannya khususnya sumber keuangan yang berasal dari sumber daya pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah daerah di Indonesia memiliki kekuatan sumber dayanya sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan kontribusi dari penduduk daerah tersebut, baik yang berupa pajak, retribusi atau iuran lain yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya memiliki tiga sumber dana yang terdiri dari: pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. PAD merupakan salah satu indikator dalam pengukuran kemandirian keuangan karena PAD didapatkan oleh pemerintah daerah itu sendiri dari potensi wilayahnya yang dipungut untuk sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Semakin tinggi jumlah PAD terhadap total belanja daerah mencerminkan bahwa pemerintah daerah memiliki cukup

dana untuk pelaksanaan peningkatan infrastruktur publik sehingga kemungkinan mengalami *financial distress* semakin kecil (Syurmita 2014; Wicaksono, 2015; Tubels, 2015). Berdasarkan pemaparan diatas, diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Kemandirian keuangan berpengaruh negatif terhadap prediksi *financial distress* pemerintah provinsi Bali

LCO adalah salah satu rasio yang mengukur efisiensi pemerintah daerah yang merupakan perbandingan antara jumlah pengeluaran modal terhadap pendapatan asli daerah. Atmaja (2012) dan Sutaryo (2009) menggunakan LCO untuk memprediksi *financial distress*. Tingginya rasio LCO menggambarkan bahwa pemerintah daerah memiliki jumlah pengeluaran modal yang tinggi terhadap pendapatan asli daerah dan pemerintah berada dalam kondisi yang inefisien karena pemerintah daerah sanggup untuk melakukan penghematan atas pendapatan asli daerah hingga mampu melakukan pengeluaran modal yang tinggi. Berdasarkan paparan diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : LCO berpengaruh positif terhadap prediksi *financial distress* pada Pemerintah Provinsi Bali.

Pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan dana lain-lain pendapatan yang sah berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006. PAD adalah sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari potensi dan sumber daya di daerah yang menjadi tiang acuan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan ataupun program kerja. Peningkatan jumlah PAD mengindikasikan bahwa dana pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan

di daerah meningkat dan secara langsung akan menunjukkan peningkatan juga dalam kemandirian daerah. Tingginya penerimaan daerah akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih menggali potensi daerah dengan memberikan pelayanan publik yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Tingginya PAD juga menunjukkan bahwa adanya peningkatan pada kemampuan daerah dalam penganggaran belanja modal.

Kemandirian keuangan daerah adalah bentuk otonomi daerah dari pemerintah pusat sebagai bentuk kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan dengan biaya yang bersumber dari potensi wilayah itu sendiri. Kemandirian daerah yang dihitung dengan membandingkan seberapa besar PAD dengan total belanja daerah menunjukkan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Sumber dana PAD ini adalah berasal dari masyarakat daerah itu sendiri. Pendapatan masyarakat yang meningkat akan memberikan peningkatan pula di pos PAD dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga rasio kemandirian daerah pun meningkat. Peningkatan jumlah masyarakat akan meningkatkan rasio kemandirian keuangan dan akhirnya akan menurunkan peluang suatu daerah mengalami *Financial Distress*. Tubels (2015) dan Syurmita (2014) menyatakan bahwa penduduk merupakan sumber daya penting dalam suatu daerah, apalagi penduduk yang berada di usia kerja akan mendorong tingkat konsumsi, meningkatkan pertumbuhan perekonomian penduduk dan meningkatkan PAD sehingga daerah akan terhindar dari kondisi *Financial Distress*. Berdasarkan pemaparan di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Jumlah penduduk memperkuat pengaruh kemandirian keuangan pada
Financial Distress

Penduduk memiliki peranan penting dalam pemerintahan baik itu melalui pengawasan yang dilakukan dan sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. LCO menggambarkan mengenai rasio efisiensi dari kinerja pemerintah dengan membandingkan seberapa besar belanja modal yang terealisasi dengan besarnya PAD yang diterima pemerintah dari sumber daya ataupun potensi yang ada di wilayahnya. Semakin tinggi rasio LCO mendeskripsikan bahwa kinerja pemerintah inefisien karena jumlah pengeluaran lebih besar dari kemampuan daerah untuk membiayai pengeluaran tersebut, sehingga semakin tinggi rasio LCO maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya *financial distress* di pemerintahan tersebut.

Besarnya belanja daerah khususnya belanja modal yang memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dipengaruhi oleh besarnya jumlah penduduk di daerah tersebut. Hariyanto (2005) menganalisis pengeluaran pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2000-2001 dengan hasil bahwa PAD, dana perimbangan dan jumlah penduduk memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah karena tuntutan masyarakat akan pelayanan publik akan semakin meningkat, sehingga pemerintah pun akan menganggarkan lebih pada akun belanja daerah. Penelitian Hariyanto (2005) sejalan dengan penelitian oleh dilakukan Syurmita (2014) dan Wicaksono (2015) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif terhadap *financial distress*, dimana jumlah penduduk yang meningkat mengindikasikan bahwa pemerintah memiliki

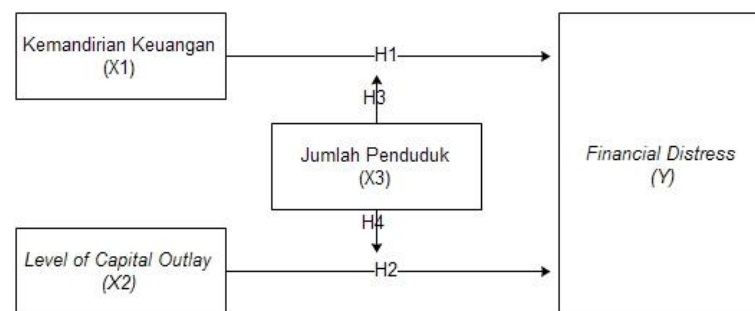
kesempatan yang kecil untuk mengalami *financial distress* karena peningkatan jumlah penduduk akan menyebabkan peningkatan jumlah pendapatan pemerintah sehingga pendapatan yang digunakan untuk belanja daerah akan meningkat. Berdasarkan pemaparan diatas, diajukan hipotesis sebagai berikut

H₄ : Jumlah penduduk memperlemah pengaruh LCO pada *Financial Distress*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif,

Berikut ini adalah desain penelitian untuk penelitian ini:



Gambar 1. Desain Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah Biro Keuangan Provinsi Bali dan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Objek penelitian ini adalah *financial distress*, kemandirian keuangan, *level of capital outlay* yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran di Kabupaten/Kota Provinsi Bali pada periode 2010 – 2015 dan data jumlah penduduk yang terdapat pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali pada periode 2010 - 2015. Penelitian ini menggunakan kemandirian keuangan dan *level of capital outlay* sebagai variabel bebas dan *financial distress* sebagai variabel terikat. Variabel pemoderasi dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk.

Variabel kemandirian keuangan diartikan sebagai seberapa besar kemampuan suatu daerah yang menggunakan sumber keuangannya sendiri untuk membiayai program kerja yang telah dibuat terlepas dari bantuan pemerintah pusat atau provinsi. Rumusan kemandirian keuangan adalah sebagai berikut: (Syurmita, 2014 dan Tubels, 2015)

$$KK = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Total Belanja Daerah}} \times 100 \% \dots\dots\dots (1)$$

LCO merupakan rasio efisiensi dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah yang menggambarkan tingkat pengeluaran modal yang didanai dari pendapatan asli daerah. Angka indikator ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan efisiensi pada kegiatan operasionalnya yang dibiayai dari besarnya PAD (Sutaryo 2010; Atmaja, 2012).

$$LCO = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \% \dots\dots\dots (2)$$

Jumlah penduduk adalah banyaknya sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah yang menjadi sumber kekuatan atau *power* dari pemerintah daerah. Jumlah penduduk yang dilambangkan dengan "Size" diukur menggunakan rumus Ln dari populasi penduduk (Syurmita, 2014).

$$\text{Size} = \text{Ln Populasi Penduduk} \dots\dots\dots (3)$$

Financial distress pada sektor publik diartikan sebagai ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menyediakan infrastruktur publik atau fasilitas publik yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan (Syurmita, 2014). Meningkatnya pengeluaran rutin pemerintah daerah dapat menekan jumlah pengeluaran untuk penyediaan infrastruktur publik. Berikut adalah rumus untuk

mengukur besarnya belanja modal terhadap total biaya (Syurmita, 2014; Tubels,2015):

$$FD = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Realisasi Total Belanja Daerah}} \times 100 \% \dots\dots\dots (4)$$

Penelitian ini menggunakan jenis data data kuantitatif yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran dan data jumlah penduduk seluruh kabupaten dan kota Provinsi Bali periode 2010-2015. Sumber data dalam penelitian ini termasuk dalam data sekunder yang terdiri dari data yang terdapat pada Biro Keuangan Provinsi Bali yaitu Laporan Realisasi Anggaran periode 2010-2015 dan data jumlah penduduk seluruh kabupaten/kota periode 2010 – 2015 yang terdapat pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data Laporan Realisasi APBD dan data jumlah penduduk kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2010-2015. Sampel dalam penelitian adalah sampel jenuh yang artinya seluruh anggota populasi dijadikan sampel sehingga sampelnya terdiri dari 54 data amatan yang berasal dari sembilan kabupaten dan kota dikalikan dengan enam tahun periode amatan.

Metode observasi non-perilaku adalah metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang berupa informasi dari pihak ketiga baik itu berupa catatan ataupun dokumen dari penelitian terdahulu yang dikutip dan dicatat yang berasal dari Biro Keuangan Provinsi Bali dan BPS Provinsi Bali, serta hasil penelitian terdahulu dan buku-buku pendukung argumentasi hasil penelitian ini. Regresi linier berganda dan *Moderated Regression Analysis (MRA)* digunakan dalam analisis data penelitian ini dengan bantuan program *Statistical Product and Service Solution (SPSS)*.

Uji regresi linier berganda dipergunakan dalam membuktikan pengaruh kemandirian keuangan terhadap *financial distress* dan pengaruh LCO terhadap *financial distress*. Pengaruh variabel moderasi moderasi dari jumlah penduduk apakah memperlemah atau memperkuat pengaruh kemandirian keuangan dan LCO terhadap *financial distress* diuji menggunakan model MRA.

$$Y = \alpha_1 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon \dots\dots\dots (5)$$

$$Y = \alpha_1 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_1 X_3 + \beta_5 X_2 X_3 + \epsilon \dots\dots\dots (6)$$

Keterangan :

- Y : *Financial Distress*
- X₁ : Kemandirian Keuangan
- X₂ : *Level Of Capital Outlay (LCO)*
- X₃ : Jumlah Penduduk
- X₁X₃ : Interaksi antara kemandirian keuangan dengan jumlah penduduk
- X₂X₃ : Interaksi antara LCO dengan jumlah penduduk
- α : Konstanta
- β : Koefisien regresi
- ε : Standar *error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif menunjukkan bagaimana keadaan data yang analisis berupa data maksimum, data rata-rata, data minimum, serta nilai dari standar deviasi data yang diuji.

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KK	54	.04	.87	.2409	.18592
LCO	54	.18	4.99	.9957	.90454
Size	54	12.05	13.69	12.9002	.48986
FD	54	.04	.28	.1381	.04581

Sumber: data diolah, 2016

Financial Distress (FD) menunjukkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur publik yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, *Financial distress* (FD) memiliki nilai maksimum senilai 0,28, nilai minimum senilai 0,04 dengan besarnya nilai rata-rata senilai 0,1381 yang memiliki arti bahwa rata-rata tingkat pengeluaran modal terhadap total belanja daerah di kabupaten dan kota Provinsi Bali sebesar 13,81 persen yang artinya pemerintah kabupaten/kota provinsi Bali berada pada kondisi *financial distress* karena tingkat belanja modalnya kurang dari target pemerintah pusat sebesar 30 persen.

Kemandirian Keuangan (KK) adalah kemampuan suatu daerah menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk membiayai program kerja yang telah dibuat terlepas dari bantuan pemerintah pusat. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif didapatkan angka 0,04 adalah nilai minimum dari kemandirian keuangan, angka 0,87 adalah nilai maksimum dari kemandirian keuangan, angka 0,2409 adalah nilai rata-rata dari kemandirian keuangan. Nilai rata-rata sebesar 0,2409 atau 24,09 persen memiliki arti bahwa rata-rata tingkat kemandirian keuangan kabupaten dan kota provinsi Bali berada pada kategori kemandirian keuangan yang rendah sekali karena berada dalam kisaran 0 persen hingga 25 persen.

Level Of Capital Outlay (LCO) adalah rasio efisiensi dari kinerja pemerintahan. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif didapatkan angka 0,18 adalah nilai minimum dari LCO, angka 4,99 adalah nilai maksimum dari LCO, angka 0,9957 adalah nilai rata-rata dari LCO dan angka 0,90454 adalah nilai

standar deviasi variable LCO. Nilai rata-rata variable LCO sebesar 0,9957 atau 99,57 persen artinya kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Bali berada dalam kategori kurang efisien karena berada pada kisaran 90 persen hingga 100 persen.

Jumlah Penduduk (Size) adalah gambaran kekuatan atau sumber daya pemerintah daerah dalam pelaksanaan program kegiatannya. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, 12,05 adalah nilai minimum dari jumlah penduduk, 13,69 adalah nilai maksimum dari jumlah penduduk, 12,9002 adalah nilai rata-rata dari jumlah penduduk dan 0,48986 adalah nilai standar deviasi dari jumlah penduduk.

Pengujian asumsi klasik yang dilakukan terdiri dari: uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas dilakukan sebelum dilakukannya analisis regresi linier berganda dan analisis MRA.

Tabel 2
Hasil Uji Asumsi Klasik Regresi Linier Berganda

Variabel	Multikolonieritas		Heteroskedastisitas	
	Tolerance	VIF	T	Sig
KK	0.898	1.113	1.732	0,089
LCO	0.898	1.113	-.879	0,383
<i>Kolmogorov - Smirnov Z</i>	= 0.687			
<i>Asymp. Sig (2 - tailed)</i>	= 0.733			
<i>Durbin - Watson</i>	= 2.169			

Sumber: data primer diolah, 2016

Model regresi linier berganda dalam penelitian ini telah lulus uji normalitas yang didasarkan pada nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* dalam tabel 2 senilai 0,733 yang nilainya lebih besar dari nilai $\alpha = 0,05$.

Selain telah lulus uji normalitas, model regresi dalam penelitian ini juga telah lulus uji multikolinieritas karena variable kemandirian keuangan dan LCO

memiliki nilai VIF yang lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* yang lebih besar dari 10 persen. Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa nilai VIF variabel kemandirian keuangan (KK) sebesar 1,113 dan variabel LCO sebesar 1,113, sedangkan nilai *tolerance* dari variabel kemandirian keuangan (KK) sebesar 0,898 dan variabel LCO sebesar 0,898.

Model regresi linier berganda penelitian ini telah lulus uji autokorelasi berdasarkan pada tabel 2 dapat diketahui bahwa model regresi linier berganda memiliki nilai *durbin-watson* sebesar 2,169. Penelitian ini menggunakan 54 data observasi dan 2 variabel bebas, sehingga berdasarkan tabel *durbin-watson* diperoleh nilai d_U sebesar 1.641 dan nilai $4-d_U$ sebesar 2.359. Nilai *durbin-watson* sebesar 2,169 lebih besar dari nilai d_U dan lebih kecil dari nilai $4-d_U$.

Uji heterokedastisitas model regresi linier berganda dapat dilihat dari nilai signifikansinya. Berdasarkan tabel 2, diketahui bahwa tingkat signifikansi variabel kemandirian keuangan (KK) sebesar 0.089 dan variabel *level of capital outlay* (LCO) sebesar 0.383. Model regresi linier berganda tidak mengandung gejala heteroskedastisitas karena variabel KK dan LCO memiliki nilai yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05 atau 5 persen .

Tabel 3
Hasil Uji Asumsi Klasik Model MRA

Variabel	Heteroskedastisitas	
	T	Sig
KK	.372	.711
LCO	.460	.648
Size	.029	.977
KK_Size	.438	.664
LCO_Size	-.487	.629
<i>Kolmogorov - Smirnov Z</i>	= .612	
<i>Asymp. Sig (2 – tailed)</i>	= .848	
<i>Durbin - Watson</i>	= 2.150	

Sumber : data diolah, 2016

Model MRA dalam penelitian ini telah lulus uji normalitas yang didasarkan pada nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* dalam Tabel 3 yaitu sebesar 0,848 yang nilainya lebih besar dari nilai $\alpha = 0,05$

Model MRA dalam penelitian ini telah lulus uji autokorelasi yang didasarkan pada nilai *durbin-watson* dalam tabel 3 yaitu sebesar 2,150 yang lebih besar dari nilai d_U dan lebih kecil dari nilai $4-d_U$. Penelitian ini menggunakan 54 data observasi dan 2 buah variabel bebas, sehingga berdasarkan tabel *durbin-watson* diperoleh nilai d_U sebesar 1,641 dan nilai $4-d_U$ sebesar 2,359.

Variabel KK, LCO, Size, KK_Size, LCO_Size memiliki nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05 atau 5 persen yang berarti bahwa model MRA yang dianalisis tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel 3, pada model *moderated regression analysis* terlihat bahwa tingkat signifikansi variabel kemandirian keuangan (KK) sebesar 0,711; variabel *level of capital outlay* (LCO) sebesar 0,648; variabel jumlah penduduk (Size) sebesar 0,977; interaksi variabel kemandirian keuangan dan jumlah penduduk (KK_Size) sebesar 0.664 dan nilai signifikansi antara interaksi *level of capital outlay* dan jumlah penduduk (LCO_Size) sebesar 0,629.

Tabel 4
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	T	Signifikansi
Konstanta	.066	7.761	.000
KK	.207	9.860	.000
LCO	.023	5.280	.000
<i>R.Square</i>	0.667	F	51.139
<i>Adjusted R Square</i>	0.654	Signifikansi	0.000

Sumber: data diolah, 2016

Berikut ini adalah persamaan regresi linier berganda berdasarkan pada hasil uji yang terdapat dalam tabel 4:

$$Y = 0.066 + 0.207X_1 + 0.023X_2 + \epsilon$$

0,066 adalah nilai konstanta (α_1). Nilai 0,066 artinya variabel *financial distress* akan mengalami peningkatan sebesar 0,066 apabila variabel independen lainnya memiliki nilai konstan. Kemandirian keuangan (KK) memiliki koefisien regresi senilai 0,207 yang artinya variabel kemandirian keuangan yang mengalami peningkatan senilai satu satuan akan menyebabkan variabel *financial distress* mengalami peningkatan senilai 0,207 dengan syarat bahwa koefisien lainnya memiliki nilai yang konstan. Nilai 0,023 adalah nilai koefisien regresi dari LCO yang artinya kenaikan satu satuan variabel LCO akan memberikan dampak kenaikan pada variabel *financial distress* senilai 0,023 dengan syarat variabel lainnya memiliki nilai yang konstan.

Hasil uji F atau kelayakan model pada regresi linier berganda dalam penelitian ini menunjukkan nilai F pada tabel 4 yang bernilai sebesar 51,139 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 dan artinya model regresi linier berganda yang digunakan telah layak digunakan untuk menganalisis.

Nilai *Rsquare* model regresi linier berganda berdasarkan pada tabel 4 adalah sebesar 0,667, artinya variabel kemandirian keuangan (X_1) dan variabel *level of capital outlay* (X_2) mampu menjelaskan variabel *financial distress* (Y) sebanyak 66,7 persen, sedangkan 33,3 persen sisanya variabel *financial*

distress dijelaskan dengan variabel diluar variabel kemandirian keuangan, variabel LCO dan variabel jumlah penduduk.

Tabel 5
Hasil Analisis MRA

Variabel	Koefisien Regresi	T	Sigmifikansi
Konstanta	.558	2.761	.008
KK	.143	3.645	.001
LCO	-.630	-2.801	.007
Size	-.040	-2.495	.016
KK_Size	.008	2.626	.012
LCO_Size	.053	2.916	.005
<i>R.Square</i>	0.730	F	25.955
<i>Adjusted R Square</i>	0.702	Signifikansi	0.000

Sumber: data diolah, 2016

Nilai konstanta (α_1) sebesar positif 0,558 artinya adalah variabel *financial distress* (FD) akan mengalami peningkatan senilai 0,558 satuan apabila variabel independen yang lain memiliki nilai konstan. Nilai dari koefisien regresi (β_1) yaitu variabel kemandirian keuangan (KK) adalah positif 0,143 yang artinya jika kemandirian keuangan mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka variabel *financial distress* (FD) juga mengalami peningkatan senilai 0,143 satuan apabila variabel independen yang lain bernilai konstan. *Level of capital outlay* (LCO) memiliki nilai koefisien regresi sebesar negatif 0,630 memiliki arti peningkatan satu satuan dari *level of capital outlay* akan menurunkan nilai *financial distress* (FD) senilai 0,630 satuan apabila variabel independen yang lain memiliki nilai yang konstan. Nilai koefisien regresi interaksi (β_4) dari kemandirian keuangan dengan jumlah penduduk (KK_Size) sebesar positif 0,008 memiliki arti apabila setiap interaksi kemandirian keuangan dengan jumlah penduduk (KK_Size) meningkat sebesar satu satuan, apabila variabel independen lainnya konstan maka *financial distress* (FD) mengalami peningkatan sebesar 0,008. Nilai koefisien regresi interaksi (β_5) dari *level of capital outlay* dan jumlah penduduk (LCO_Size)

sebesar positif 0,053. Koefisien regresi bernilai positif memiliki arti bahwa apabila setiap interkasi *level of capital outlay* dan jumlah penduduk (*LCO_Size*) meningkat sebesar satu satuan, maka *financial distress* yang diproksikan dengan besarnya realisasi belanja modal terhadap realisasi total belanja daerah (FD) meningkat sebesar 0,053 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

Model MRA pada penelitian ini layak dan bisa untuk digunakan berdasarkan pada uji kelayakan model regresi berdasarkan pada tabel 5 dengan hasil F senilai 25.955 dengan tingkat signifikansi senilai 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05.

Model MRA memiliki nilai *Rsquare* sebesar 0,730 berdasarkan table 5 memiliki arti kontribusi variabel kemandirian keuangan (KK), *level of capital outlay* (LCO), jumlah penduduk (Size), interaksi kemandirian keuangan dengan jumlah penduduk (KK_Size), dan interaksi *level of capital outlay* dengan jumlah penduduk (*LCO_Size*) dalam menjelaskan variable *financial distress* adalah sebesar 73 persen, sisanya 27 persen variabel *financial distress* dijelaskan oleh faktor lainnya di luar persamaan regresi.

Hipotesis pertama menyatakan kemandirian keuangan berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Nilai signifikansi uji t untuk variabel kemandirian keuangan (KK) berdasarkan tabel 4 adalah senilai 0,000 yang nilainya lebih kecil dari 0,05 dan nilai dari koefisien regresinya adalah positif 0,207. Ini berarti hipotesis pertama (H_1) ditolak, artinya secara parsial kemandirian keuangan berpengaruh positif dan signifikan pada *financial distress*.

Tingkat kemandirian keuangan yang tinggi belum tentu dapat memberikan pelayanan dan infrastruktur publik yang sesuai dengan standar dikarenakan pendapatan yang diterima oleh daerah tidak sepenuhnya dianggarkan untuk belanja modal yang sesuai dengan target yang telah ditentukan, ataupun apabila belanja modal sudah dianggarkan sesuai target tetapi dalam pengrealisasiannya belum cukup mampu mengejar peningkatan belanja modal. Sehingga semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan semakin tinggi pula tingkat kemungkinan terjadinya *financial distress* karena ketidakefisienan dan ketidaefisiensian dalam masalah penganggaran dan pengrealisasian anggaran.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa variabel *level of capital outlay* berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Nilai signifikansi uji t untuk variabel *level of capital outlay* berdasarkan table 4 adalah 0,000 yang nilainya lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien regresinya adalah positif 0,023. Artinya secara parsial *level of capital outlay* berpengaruh positif dan signifikan pada *financial distress*.

Ketidakefisiensian kinerja pemerintah yang diproksikan dengan besarnya nilai LCO ini dikarenakan pemerintah daerah kurang mampu untuk melakukan penganggaran dan pengrealisasian yang sesuai terhadap standar pelayanan publik yang ditentukan, dimana pemerintah daerah masih banyak belum mengalokasikan pendapatan yang dihasilkan untuk pengeluaran belanja modal yang notabene belanja modal adalah pengeluaran pemerintah untuk peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik.

Hipotesis ketiga menyatakan jumlah penduduk memperkuat pengaruh kemandirian keuangan terhadap *financial distress*. Tabel 5 menunjukkan nilai signifikansi uji t untuk variabel interaksi kemandirian keuangan dengan jumlah penduduk (KK_Size) adalah sebesar 0,012 yang nilainya lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar positif 0,008 serta koefisien regresi variabel kemandirian keuangan (KK) bernilai positif 0,143. Artinya jumlah penduduk mampu memoderasi pengaruh kemandirian keuangan terhadap *financial distress* dan memperkuat hubungan positif kemandirian keuangan terhadap *financial distress*. Tingginya jumlah penduduk akan mempengaruhi jumlah penerimaan pemerintah. Jumlah penduduk yang tinggi akan meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat dan meningkatkan tingkat perekonomian daerah sehingga penerimaan pemerintah melalui PAD pun meningkat. Peningkatan PAD akan mempengaruhi peningkatan kemandirian keuangan daerah sehingga kemungkinan terjadinya *financial distress* menurun.

Hipotesis keempat menyatakan bahwa jumlah penduduk memperlemah pengaruh *level of capital outlay* terhadap *financial distress*. Berdasarkan tabel 5, diperoleh nilai signifikansi interaksi *level of capital outlay* dengan jumlah penduduk (LCO_Size) sebesar 0,005 yang nilainya lebih kecil dari 0,05, koefisien regresi variabel interaksi bernilai positif sebesar 0,053 dan koefisien regresi *level of capital outlay* bernilai negatif 0,630. Artinya jumlah penduduk mampu memoderasi pengaruh *level of capital outlay* terhadap *financial distress* dan memperlemah pengaruh *level of capital outlay* terhadap *financial distress*.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kemandirian keuangan dan *level of capital outlay* berpengaruh terhadap *financial distress*, dan jumlah penduduk mampu untuk memoderasi pengaruh kemandirian keuangan dan *level of capital outlay* terhadap *financial distress*. Berdasarkan pada statistik deskriptif dapat diketahui bahwa kabupaten dan kota di provinsi Bali memiliki tingkat kemandirian sebesar 24,09 persen yang berada pada tingkat kemampuan keuangan yang rendah sekali, tingkat efisiensi kinerja sebesar 99,57 persen yang berada dalam keadaan yang kurang efisien, serta rata-rata realisasi belanja modal terhadap belanja daerahnya sebesar 13,81 persen yang masih jauh dari target pemerintah pusat sebesar 30 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten dan kota provinsi Bali belum dapat memaksimalkan kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat melalui otonomi daerah. Pemerintah daerah provinsi Bali diharapkan lebih memaksimalkan potensi daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah sehingga dapat meningkatkan kemandirian keuangan dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

REFERENSI

- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan Di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1):53-64.
- Ardhini dan Sri Handayani. 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Persepektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. *Jurnal*.

- Atmaja, Khoirul Fariz. 2012. Analisis Rasio Keuangan untuk Memprediksi Kemungkinan Financial Distress. *Accounting Analysis Journal*, 1(2):1-7.
- Bisma, I. D. G dan Hery Susanto. 2010. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. *GaneÇ Swara Edisi Khusus*, 4(3):75-86
- Clark, T.N. 1977. Fiskal Management of American Cities Funds Flow Indicator. *Journal of Accounting Research*, 15.
- Cohen, Sandra., Michael Doumpos, Evi Neophytou, Constantin Zopounidis. 2011. Assesing Financial Distress where Bankrupttcy is not an Option: An Alternative Approach for Local Municipalities. *Working Paper of Technical University of Crete*.
- Emerson, R. M. 1962. Power-Dependence Relations. *American Sociological Review*, 27(1): 31-41.
- Evans, J dan Patton, J .1987. Signalling and Monitoring in Public Sektor Accounting. *Journal Accounting Research*, 25: 130-158.
- Gailmard, Sean. 2010. Politics, Principal-Agent Problems, and Public Service Motivation. *International Public Management Journal* 13(1):35-45.
- Hagen, V. J. 2003. Budgeting Institutions and Public Spending. *Handbook on Public Sector Performance Reviews*. 1.
- Jensen, M.C., dan W.H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial behavior, Agency cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*sp. 3-24
- Jones, Steward and R., G Walker. 2007. Explanators of Local Government Distress. *ABACUS*, 43(3): 396-418.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2013. Laporan Evaluasi Belanja Modal Daerah. Jakarta.
- Kleine, R P. Kloha, and C. Weissert, 2005. Monitoring local government fiskal health: Michigan's new 10-point scale of fiskal distress. *Government Fiskal Review*, 19(3): 169-190.
- Levine, Helisse, J. B. Justice, E.A. Scorsone. 2013. Handbook of Local Government Fiskal Health 1st edition.

- Moe, T.M. 1984. The New Economics of Organizations. *American Journal of Politic Science*, 28(4): 739-777.
- Ncube, Mkhululi dan Nomfundo Vacu. 2014. Measuring Financial Disress in South African Local Government Sektor. *Journal*.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
- Prayitno, Hadi. 2012. Birokrasi Tambun'; 291 Daerah Habiskan Separuh Lebih APBD untuk Belanja Pegawai dalam Press Release Sekretariat Nasional Forum Infonesia untuk Transparansi Anggaran, Jakarta, 9 April 2012.
- Plat, H, dan M.B Platt. 2002. Predicting Financial distress. *Journal of Financial Service Profesional*.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : ALFABETA BANDUNG
- Sutaryo, B. S. dan Doddy Setiawan. 2010. Nilai Relevan Informasi Laporan Keuangan Terkait Financial Distress Pemerintah Daerah. *SNA XIII Purwekerto*.
- Syurmita. 2014. Prediksi Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *SNA 17 Mataram*, Lombok
- Trussel, John M dan Patricia A. Patricit. 2009. A Predictive Model of Fiskal Distress in Local Governments. *Journal Of Publik Budgeting, Accounting and Financial Management*, 21(4): 578-616.
- Tubels, Agus. 2015. Evaluasi Financial Distress pada Pemerintah Kota Bandar Lampung. *Jurnal Akuntansi*.
- Wicaksono, Adhi. 2015. Financial Distress pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia. *Tesis*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Sebelas Maret.
- Wolff, G. B. 2004. Fiskal Crises in U.S Cities: Structural and Non-structural Causes. *Journal*.